

Wajah Bopeng Kebinekaan

Edi Setiadi

Guru Besar Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Unisba



INDONESIA adalah negeri yang sering dikatakan sebagai negara makmur loh jinawi, memiliki beberapa kelebihan dibandingkan negara lain karena letaknya yang strategis diapit oleh dua samudera dan dua benua, mempunyai sumber kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang banyak. Pendek kata merupakan negara yang semestinya makmur bukan kategori negara yang miskin dan terbelakang.

Tujuh puluh dua tahun sudah Indonesia merdeka yang direbut dengan darah, air mata dan jiwa rakyatnya. Suatu perjalanan sejarah yang sudah banyak menorehkan keberhasilan dan kegagalan, tetapi pertanyaan sederhana dapat diajukan sudahkah pimpinan negara ini dari masa ke masa membawa rakyatnya kepada tujuan dan cita-cita kemerdekaan sebagaimana amanat konstitusi negara 1945.

Renungan keindonesiaan dapat dipilah ke dalam tiga episode, episode mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, episode pembangunan dan episode kebebasan dari segala macam keterbelakangan atau episode reformasi. Awal-awal kemerdekaan sampai berakhirnya Orde Lama gejolak politik, keamanan dan perbaikan ekonomi terus-menerus menguras pikiran dan tenaga rakyat Indonesia sehingga pada masa ini jargon-jargon politik lebih dominan dibandingkan dengan perbaikan ekono-

mi. Rakyat selalu diarahkan kepada persoalan-persoalan ekonomi sehingga pembangunan SDM dilupakan. Masa Orde Baru pun *idem dito*, rakyat selalu dijejali dengan slogan pembangunan sehingga jalannya roda penyelenggaraan negara diwarnai dengan sifat represif pemerintah, ruang beda pendapat dan kritik ditutup, rakyat hanya diam karena tidak ada saluran yang dibuka oleh pemerintah, dan berakhir ke zaman reformasi yang tidak ada beda dengan zaman-zaman sebelumnya.

Persoalan keindonesiaan yang masih belum terselesaikan adalah masalah separatisme, intoleransi dalam bidang sara, ketidakadilan hukum, serta kebodohan dan kemiskinan. Gejolak separatisme walaupun hanya dua daerah yaitu Aceh dan Papua berpotensi menggoyahkan sendi-sendi NKRI, kedua daerah ini baik secara terang-terangan maupun halus selalu berusaha "beda" dengan Indonesia yang kalau dibiarkan bukan tidak mungkin kedua daerah ini akan lepas dari NKRI. Akar persoalan separatisme sebenarnya selalu berasal dari ketidakadilan sosial dan hukum. Kedua daerah ini sejak zaman kemerdekaan selalu dijadikan objek bukan subjek sebagai warga negara Indonesia.

Perlakuan pembangunan dan pemerataan ekonomi berbeda jauh dengan daerah Jawa khususnya, padahal dalam sejarahnya kedua daerah ini rakyatnya mempunyai andil yang

besar dalam terwujudnya NKRI. Separatisme akan berkurang manakala negara mampu menyejahterakan mereka sejajar atau lebih dibandingkan dengan rakyat di daerah lainnya atau paling tidak proporsional dengan pengorbanan yang diberikan oleh suatu daerah. Kesempatan berkariyer dan kedudukan politik, sosial dan ekonomi dari dua daerah ini hampir tidak diberi kesempatan sehingga menimbulkan jurang perbedaan yang sangat mencolok.

Radikalisme

Mirip dengan gejala separatisme adalah radikalisme, bibit-bibit ini muncul bersamaan dengan ketidakadilan terutama ketidakadilan hukum dan ada upaya memarginalkan suatu golongan yang dilakukan oleh pemerintah (walaupun selalu dibantah). Penanggulangan masalah radikalisme ini selalu mengalami kegagalan karena opsi yang dilaksanakan selalu parsial yaitu tindakan refresif malah kadangkala tindakan nonyudisial (tembak di tempat) bagi pelaku radikalisme.

Radikalisme yang sedikit halus adalah sifat intoleransi antarumat beragama, masing-masing penganut agama pernah melakukan sikap-sikap intoleran kepada pemeluk agama lainnya. Umat beragama semestinya menyadari bahwa dalam konteks sosial, agama tidak dimaknai sebagai ritus, liturgi, doa, dan pengalaman mistik yang bersifat personal dan unik, tetapi juga hadir dengan fungsi manifest dan laten yang kadang tidak dikehendaki oleh pemeluknya. Di satu sisi agama bisa dijadikan instrumen yang efektif dalam memicu disintegrasi sosial, sarana konflik, ketegangan, friksi dan kontradiksi. Agama

dan negara mempunyai relasi yang erat dan tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat.

Mukadimah konstitusi kita merupakan representasi dari pengakuan negara terhadap eksistensi agama meskipun Indonesia secara tegas mengonsepsikan diri sebagai negara kesatuan bukan negara agama. Akan tetapi, keberagaman dalam bidang agama tetap merupakan sendiri dari kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Namun, dalam tataran empiris konsepsi keberagaman ini masih sering dipertanyakan orang, betulkah negara masih menghormati pluralisme, mengingat konflik-konflik kekerasan berbasis agama masih tumbuh subur dan bahkan berakar dalam alam bawah sadar masyarakat.

Ketegangan tentang hubungan agama dan negara diilhami oleh konstelasi sosial dan budaya Indonesia yang heterogen. Akan tetapi bukankah negara telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan hak kebebasan beragama, kenapa sampai sekarang negara belum mampu membendung isu-isu sektarian yang mengatasnamakan agama. Fase disintegrasi nyaris dialami bangsa ini dengan konflik-konflik SARA. Padahal agama sejatinya obat luka manakala manusia dirundung oleh duka nestapa dan keluh kesah, agama ibarat pelita hati yang membimbing manusia mengarungi kehidupan yang penuh tantangan. Dengan demikian, semestinya zaman reformasi ini bisa mentoleransi agama, sehingga cita hukum dan cita sosial tidak seperti realitas sekarang ini.

Sampai sekarang problem terbesar dari kehidupan bernegara adalah penegakan hukum dan ketaatan kepada hu-

Ole-Ole

angket

PEMBENTUKAN
Pansus Hak Angket.
- Maksudnya.

uruk

SALURAN irigasi
diuruk tanpa izin.
- Teu sopan pisan.

bus

BUS Lebaran tak
laik jalan.
- Awasi terus.

Si Kabayan

kum. Sering dikatakan bahwa kehidupan berhukum kita sejak zaman Orde Lama sampai dengan masa reformasi selalu menampilkan wajah bopeng dalam arti hukum selalu berpihak kepada *the power* dengan cara menindas *the powerless*. Hukum menunjukkan wajah penuh kebengisan kepada orang yang tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Hukum dipakai sebagai alat penindas dalam rangka mempertahankan kekuasaan atau *status quo*. Hukum tidak lagi menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapa dalam perjalanan berhukum kita ini selalu dirundung keprihatinan dan kegetiran. Banyak rakyat kecil yang tidak memperoleh perlindungan dan keadilan hukum sementara segelintir orang dengan pongahnya mempermainkan dan menyiasati hukum.

Sebuah renungan dalam menghayati dan memaknai keindonesiaan. Jayalah negeriku!***